

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN
LIKUIDITAS TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN
DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH
TAHUN 2021**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi

**Peminatan :
Akuntansi Perpajakan**



Diajukan Oleh:

ERLIN PUJANTI

NIM. 1922100042

**FAKULTAS EKONOMI & PSIKOLOGI
UNIVERSITAS WIDYA DHARMA
KLATEN
Juli 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN
LIKUIDITAS TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN
DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH
TAHUN 2021**

Diajukan oleh:

ERLIN PUJANTI

NIM. 1922100042

Telah disetujui Pembimbing untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Program Studi Akuntansi

Universitas Widya Dharma

Pada tanggal : 14 Juni 2023.....

Pembimbing Utama



Oki Kuntaryanto, S.E., M.Si., Ak., CA.

NIDN. 0018107901

Pembimbing Pendamping



Cahaya Nugrahani, S.E., M.Si.

NIDN. 0605017702

Mengetahui:

Ketua Program Studi Akuntansi



Agung N. J., S.E., M.Si., M. Pd., Ak., CA.

NIDN. 0610077201

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN
LIKUIDITAS TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN
DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH
TAHUN 2021**

Diajukan oleh:

ERLIN PUJANTI

NIM. 1922100042

Telah dipertahankan di hadapan Dewan/Penguji Skripsi Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Psikologi Universitas Widya Dharma dan diterima untuk
memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

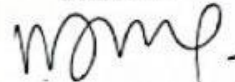
Pada tanggal : 4 Juli 2023.....

Ketua



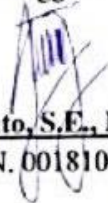
Dr. Arif Julianto, S.N., M.Si
NIDN. 0610077201

Sekretaris



Agung N. J., S.E., M.Si., M. Pd., Ak., CA.
NIDN. 0610077201

Anggota



Oki Kuntaryanto, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIDN. 0018107901

Anggota -



Cahaya Nugrahani, S.E., M.Si.
NIDN. 0605017702



Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Psikologi

Dr. Arif Julianto, S.N., M.Si
NIDN. 0610077201

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erlin Pujianti

NIM : 1922100042

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Psikologi

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul: **“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Likuiditas terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2021”** adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas plagiat. Hal-hal lain yang bukan merupakan karya saya dalam skripsi ini telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam Daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan Ijazah dan pencabutan gelar yang saya peroleh dari karya skripsi ini.

Klaten, Mei 2023

Yang membuat pernyataan

A handwritten signature in black ink is written over a 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number 'SF3AKX518000497'. The signature is a cursive script that flows across the stamp.

Erlin Pujianti

MOTTO

Jangan takut salah dan berbuat alpa, sebab dari situ para pembelajar
bisa dewasa.

(Najwa Shihab)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, skripsi ini peneliti persembahkan untuk orang-orang terkasih berikut ini.

1. Kedua orang tua saya, Alm Bapak Bambang Pujianto dan Mama Sri Pujowati yang senantiasa memberikan motivasi, semangat, doa, dan kasih sayang yang tiada tara. Terima kasih atas segala upaya yang telah Alm Bapak dan Mama berikan kepada peneliti, semoga gelar ini dapat membuat Alm Bapak dan Mama bangga atas jerih payah kalian.
2. Kakakku, Indah Pujianti yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil serta memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Adikku, Winy Trie Pujianti yang selalu mengalah dan memberikan semangat.
4. Aldo Bagus Nugroho, terima kasih atas semangat, bantuan, dan dukungannya yang selalu mendampingi hingga selesainya penelitian ini.
5. Teman seperjuangan, Akuntansi Angkatan 2019 terima kasih atas semua kenangan yang telah kalian berikan, kenangan ini takkan terlupakan.
6. Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu yang telah berpartisipasi dalam menyelesaikan penelitian ini.
7. Almameter tercinta, Universitas Widya Dharma Klaten.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Likuiditas terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2021”**.

Adapun maksud disusunnya skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Psikologi Universitas Widya Dharma Klaten. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang ada pada diri peneliti.

Selama penyusunan skripsi ini, telah banyak mendapat arahan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak sebagai berikut ini.

1. Bapak Prof. Dr. H. Triyono, M.Pd., selaku Rektor Universitas Widya Dharma Klaten.
2. Bapak Dr. Arif Julianto S.N., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Psikologi Universitas Widya Dharma Klaten.
3. Bapak Agung Nugroho Jati, S.E., M.Si., M.Pd., Ak., C.A., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Widya Dharma Klaten.

4. Bapak Oki Kuntaryanto, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Dosen Pembimbing Utama yang sudah berkenan memberikan arahan dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi.
5. Ibu Cahaya Nugrahani, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti dalam proses penyusunan skripsi.
6. Segenap Bapak/Ibu Dosen Program Studi Akuntansi Universitas Widya Dharma Klaten, terima kasih atas bekal ilmu yang sudah diberikan selama masa pembelajaran berlangsung.
7. Kedua orang tua, Alm Bapak Bambang Pujiyanto dan Mama Sri Pujowati yang senantiasa memberikan motivasi, semangat, doa, dan kasih sayang yang tiada tara, terima kasih atas semuanya.
8. Kakakku, Indah Pujianti yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil serta memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Adikku, Winy Trie Pujianti yang selalu mengalah dan memberikan semangat.
10. Aldo Bagus Nugroho, terima kasih atas semangat, bantuan, dan dukungannya yang selalu mendampingi hingga selesainya penelitian ini.
11. Keluarga besar yang sudah mendukung dan memberikan semangat.
12. Teman seperjuangan, Akuntansi Angkatan 2019 terima kasih atas semua kenangan yang telah kalian berikan, kenangan ini takkan terlupakan.
13. Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu yang telah berpartisipasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

Semoga kebaikan yang telah diberikan semua pihak mendapatkan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa atas kebaikan pihak-pihak terkait yang dengan ikhlas memberikan doa, semangat, dan bimbingannya. Meskipun masih jauh dari kata sempurna, diharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak Aamiin.

Klaten, Mei 2023

Peneliti

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | Error! Bookmark not defined. |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | Error! Bookmark not defined. |
| SURAT PERNYATAAN..... | Error! Bookmark not defined. |
| MOTTO | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL..... | xiii |
| DAFTAR GAMBAR | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |
| ABSTRAK | xvi |
| ABSTRACT | xvii |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 10 |
| BAB II..... | 11 |
| TINJAUAN PUSTAKA | 11 |
| A. Landasan Teori..... | 11 |

| | |
|--|----|
| 1. Kemandirian Keuangan Daerah..... | 11 |
| 2. Pajak Daerah..... | 12 |
| 3. Retribusi Daerah..... | 13 |
| 4. Likuiditas..... | 17 |
| B. Rerangka Pemikiran..... | 18 |
| C. Pengembangan Hipotesis..... | 20 |
| 1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah..... | 20 |
| 2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah..... | 21 |
| 3. Pengaruh Likuiditas terhadap Kemandirian Keuangan Daerah..... | 22 |
| BAB III..... | 24 |
| METODE PENELITIAN..... | 24 |
| A. Populasi dan Sampel..... | 24 |
| 1. Populasi..... | 24 |
| 2. Sampel..... | 24 |
| B. Data dan Sumber Data..... | 25 |
| 1. Data..... | 25 |
| 2. Sumber Data..... | 25 |
| C. Teknik Pengumpulan Data..... | 25 |
| D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian..... | 26 |
| 1. Variabel Terikat (Variabel Dependen)..... | 26 |
| 2. Variabel Bebas (Variabel Independen)..... | 28 |
| E. Teknik Analisis Data..... | 29 |
| BAB IV..... | 34 |

| | |
|--|----|
| HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 34 |
| A. Deskripsi Objek Penelitian..... | 34 |
| B. Uji Statistik Deskriptif | 35 |
| C. Uji Asumsi Klasik | 37 |
| 1. Uji Normalitas | 37 |
| 2. Uji Multikolinearitas | 39 |
| 3. Uji Heteroskedastisitas | 40 |
| D. Uji Hipotesis..... | 41 |
| 1. Uji Analisis Regresi Linier Berganda..... | 41 |
| 2. Uji Simultan (Uji - F) | 43 |
| 3. Uji Parsial (Uji - t)..... | 44 |
| 4. Uji Koefisien Determinan..... | 45 |
| E. Pembahasan | 46 |
| BAB V..... | 52 |
| KESIMPULAN DAN SARAN..... | 52 |
| A. Kesimpulan..... | 52 |
| B. Saran..... | 53 |
| DAFTAR PUSTAKA | 55 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-------------|--|----|
| Tabel 1. 1 | Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2021 | 7 |
| Tabel 3. 1 | Pola Hubungan dan tingkat Kemampuan Daerah | 28 |
| Tabel 4. 1 | Daftar Sampel | 34 |
| Tabel 4. 2 | Daftar Sampel Setelah Eliminasi Data Outlier | 35 |
| Tabel 4. 3 | Hasil Statistik Deskriptif..... | 36 |
| Tabel 4. 4 | Hasil Uji Normalitas | 38 |
| Tabel 4. 5 | Hasil Uji Multikolinearitas..... | 39 |
| Tabel 4. 6 | Hasil Uji Heteroskedastisitas | 40 |
| Tabel 4. 7 | Hasil Uji Heteroskedastisitas Setelah Eliminasi Data Outlier | 41 |
| Tabel 4. 8 | Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda..... | 42 |
| Tabel 4. 9 | Hasil Uji F..... | 43 |
| Tabel 4. 10 | Hasil Uji t..... | 44 |
| Tabel 4. 11 | Hasil Uji Koefisien Determinan..... | 46 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-------------|---|----|
| Gambar 1. 1 | Komposisi Pendapatan APBD di Indonesia..... | 2 |
| Gambar 2. 1 | Rerangka Pemikiran | 18 |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Sampel Setelah Eliminasi Data *Outlier*
- Lampiran 2 Data Penelitian
- Lampiran 3 Hasil Analisis Data Penelitian dengan Program SPSS IMB. 25.0
- Lampiran 4 Titik Persentase Distribusi t (df = 1-40)
- Lampiran 5 Titik Persentase Distribusi F (df = 1-32)
- Lampiran 6 Boxplot Data *Outlier*
- Lampiran 7 Hasil *Plagiarism Checker X Originality Report*

ABSTRAK

Erlin Pujianti, NIM 1922100042, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Psikologi Universitas Widya Dharma Klaten, Judul Skripsi : “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Likuiditas terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2021”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji (1) pengaruh pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah, (2) pengaruh retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah, (3) pengaruh likuiditas terhadap kemandirian keuangan daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota tahun 2021. Pemilihan sampel menggunakan teknik *sensus sampling*, diperoleh sampel sebanyak 35 pemerintah daerah. Metode analisis yang digunakan antara lain uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, serta uji hipotesis menggunakan metode regresi linier berganda, uji-F (simultan), uji-t (parsial), uji koefisien determinan (R^2). Hasil penelitian ini menunjukkan pajak daerah dan likuiditas berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Likuiditas, Kemandirian Keuangan Daerah

ABSTRACT

Erlin Pujianti, NIM 1922100042, Accounting Study Program, Faculty of Economics and Psychology, University of Widya Dharma Klaten, Thesis title: "The Influence of Local Taxes, Regional Levies, and Liquidity on Regional Financial Independence in Regencies/Cities in Central Java in 2021".

The purpose of this study is to examine (1) the effect of local taxes on regional financial independence, (2) the effect of regional levies on regional financial independence, (3) the effect of liquidity on regional financial independence. The population in this study were district/city local governments in the Central Java Province region consisting of 29 regencies and 6 cities in 2021. The sample selection used a census sampling technique, a sample of 35 local governments was obtained. The analytical methods used include descriptive statistical tests, classic assumption tests which include the normality test, multicollinearity test, and heteroscedasticity test, as well as hypothesis testing using multiple linear regression methods, F-test (simultaneous), t-test (partial), coefficient test determinant (R^2). The results of this study indicate that regional taxes and liquidity have a positive effect on regional financial independence, while regional levies have no effect on regional financial independence.

Keywords: Regional Taxes, Regional Levies, Liquidity, Financial Independence Area

BAB I

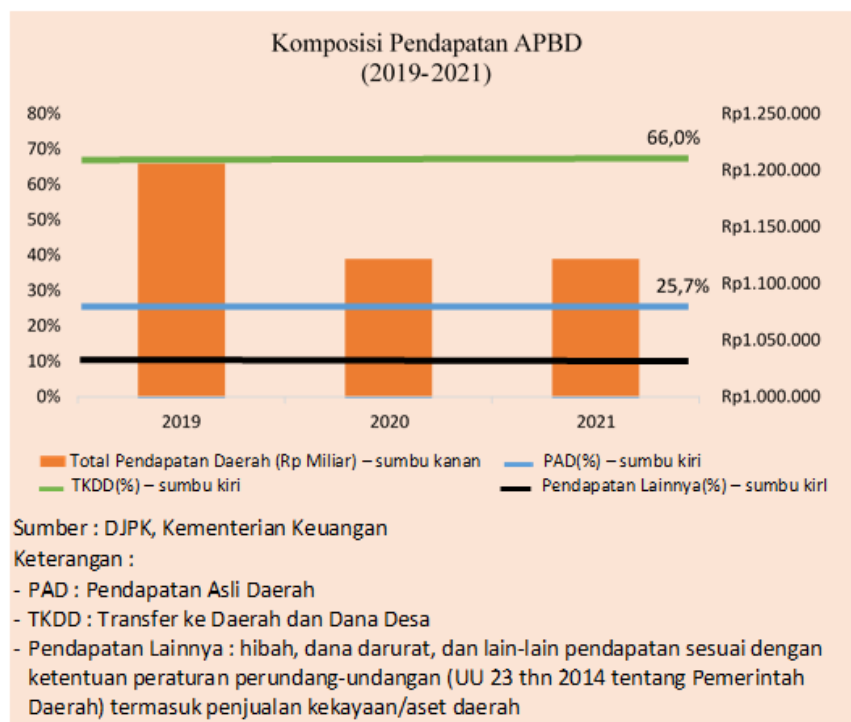
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa definisi asas otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk melihat sejauh mana kemampuan pemerintah dalam menjalankan otonomi daerahnya adalah melalui kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan apakah daerah tersebut mampu menggali sumber keuangan yang ada, mengelola, dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai kegiatan pemerintah dan meminimalkan ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat agar pendapatan asli daerah menjadi sumber utama keuangan daerah tersebut. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerahnya, maka semakin rendah pula tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dari luar seperti pemerintah pusat dan pinjaman.

Menurut situs web [Datanesia](http://datanesia.com), mengacu pada formula yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, rata-rata tingkat kemandirian kabupaten/kota di Indonesia masuk kategori “Rendah”. Rata-rata rasio PAD terhadap total pendapatan daerah hanya 25,7% pada tahun 2021 sehingga mendekati kategori “Sangat Rendah”. Dengan begitu, 514

kabupaten/kota di Indonesia masih bergantung pada bantuan dana dari pemerintah pusat, yang persinya sekitar 66,0%.



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Gambar 1. 1 Komposisi Pendapatan APBD di Indonesia

Gambar diatas merupakan data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang memperlihatkan tingginya ketergantungan daerah pada transfer dana dari pemerintah pusat, artinya apabila tidak ada transfer dana dari pemerintah pusat, maka kegiatan pemerintah daerah akan terhambat bahkan berpotensi berhenti.

Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah diantaranya penerimaan pendapatan asli daerah seperti pajak daerah dan retribusi daerah. Pada era pemerintahan otonomi daerah, pajak daerah dan retribusi daerah menjadi hal yang penting diperhatikan bagi setiap pemerintah

daerah, karena kedua komponen tersebut merupakan penyumbang terbesar bagi pendapatan asli daerah (Sutrisno dan Santoso, 2021). Dengan memiliki sumber keuangan daerah yang besar diharapkan mampu meningkatkan kemampuan kemandirian keuangan daerahnya.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Halim, 2001).

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Rahmayani dan Kurnadi (2022), Saraswati dan Nurharjanti (2021), Lukitawati dan Pringgabayu (2020), Febriyanti dan Faris (2019), Balqis dkk. (2018), Haerunnisa (2018), dan Nggilu dkk. (2016) menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pajak daerah yang diterima maka ketergantungan terhadap dana transfer dari luar seperti pemerintah pusat atau pinjaman akan rendah sehingga kemampuan kemandirian keuangan daerah tersebut akan tinggi. Penelitian yang telah dilakukan oleh Karouw dkk. (2022) menyatakan bahwa pajak daerah tidak mempengaruhi terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Artinya tinggi rendahnya pajak daerah tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah

daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Sunarto dan Sunyoto, 2016).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lukitawati dan Pringgabayu (2020), Febriayanti dan Faris (2019) dan Nggilu dkk. (2016) menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian Keuangan Daerah. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat penerimaan retribusi daerah tersebut maka ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat atau pinjaman akan rendah sehingga kemandirian keuangan daerah tersebut akan tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Karouw dkk. (2022), Rahmayani dan Kurnadi (2022), dan Saraswati dan Nurharjanti (2021) menyatakan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Artinya tinggi rendahnya retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Selain menggunakan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah dapat menggunakan alternatif lain selain sumber dana dari pemerintah pusat untuk pembiayaan daerah yaitu dengan melakukan pinjaman daerah. Dalam melakukan pinjaman pemerintah daerah harus mengembalikan utang tersebut terutama utang jangka pendeknya untuk memperlancar kegiatan pemerintah.

Untuk pengukuran kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban atau utangnya kepada pihak luar, dapat menggunakan rasio likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan (pemerintah daerah)

dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar (Hadi, 2010)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2010) menyatakan bahwa likuiditas yang diukur dengan rasio cepat atau *quick ratio* berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat likuiditas maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya sehingga kemandirian keuangan daerahnya semakin tinggi.

Kaitan logis antara likuiditas dengan kemandirian keuangan daerah adalah terletak pada keadaan posisi utang atau kewajiban yang dimiliki pemerintah daerah. Pengukuran kemandirian daerah tidak terlepas dari ada tidaknya posisi kewajiban pemerintah daerah dalam membiayai semua urusan pemerintahan dan pembangunan pada suatu daerah (Hadi, 2010).

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya masih ditemukan hasil penelitian tidak konsisten dari setiap variabel yang diuji. Adanya ketidakkonsistenan tersebut membuat peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian kembali mengenai apa saja yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Febriyati dan Faris (2019) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adanya variabel baru yaitu likuiditas serta pemilihan sampel penelitian. Alasan peneliti menambah

variabel likuiditas karena, likuiditas merupakan suatu hal yang dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Jika pemerintah daerah memiliki utang terutama utang jangka pendeknya, maka pemerintah daerah itu harus membayar utang tersebut dan jikalau pemerintah daerah itu mampu memenuhi utang jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancarnya maka daerah tersebut dikatakan mandiri dalam keuangan daerahnya. Variabel likuiditas ini belum banyak dijadikan bahan penelitian sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian ini.

Jawa Tengah merupakan daerah yang sangat berpotensi dari segi sumber daya alamnya. Menurut Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sri Puryono mengungkapkan bahwa Jateng memiliki potensi investasi unggulan yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota, baik sektor primer, sekunder, maupun tersier yang sangat layak dikembangkan menjadi peluang investasi. Salah satunya bidang industri pariwisata. Saat ini Jateng memiliki 467 daya tarik wisata (DTW) yang terdiri dari 148 DTW alam, 85 DTW budaya, 117 DTW buatan, dan 19 DTW minat khusus. Selain itu, juga ada destinasi yang masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yaitu Borobudur, Karimun Jawa, Dieng dan Sangiran. Destinasi-destinasi tersebut didukung dengan adanya konektivitas Jogja-Solo-Semarang (Joglosemar). Jika potensi disetiap kabupaten/kota dikelola dan diinovasi oleh pemerintah daerah dengan maksimal maka akan menyumbangkan pendapatan yang besar untuk daerah tersebut. (sumber: jatengprov.go.id)

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan dari total 34 provinsi di Indonesia terdapat 10 provinsi yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbesar pada tahun 2021. Adapun 10 provinsi tersebut ialah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Papua, Aceh, Sumatera Utara, Banten, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan. Jawa Tengah berada pada urutan ke 4 diantara 10 provinsi tersebut. Besarnya kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dalam sektor pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penerimaan anggaran Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. 1 Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2021

| Tahun | Pendapatan Asli Daerah | Pajak Daerah | Retribusi Daerah |
|--------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 2019 | Rp14.437.914.236.398 | Rp11.951.919.535.383 | Rp114.861.058.851 |
| 2020 | Rp13.668.282.278.855 | Rp11.139.173.309.780 | Rp 93.279.121.699 |
| 2021 | Rp14.695.474.898.162 | Rp11.718.378.320.505 | Rp 91.634.269.205 |

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah realisasi pendapatan asli daerah tahun 2019 sebesar Rp 14.437.914.236.398 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar Rp 13.668.282.278.855. Penurunan pada pendapatan asli daerah ini juga diiringi dengan penurunan pada sektor pajak daerah dan retribusi daerahnya. Pada tahun 2019 jumlah pajak daerah provinsi jawa tengah sebesar Rp 11.951.919.535.383 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp 11.139.173.309.780

sedangkan jumlah retribusi daerah tahun 2019 sebesar Rp 114.861.058.851 juga mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi Rp 93.279.121.699.

Kemudian pada tahun 2021 jumlah realisasi pendapatan asli daerah (PAD) mengalami kenaikan sebesar Rp 14.695.474.898.162 dibandingkan pada tahun sebelumnya tahun 2020 sebesar Rp 13.668.282.278.855. Kenaikan pada pendapatan asli daerah (PAD) diiringi dengan kenaikan pada sektor pajak daerah namun tidak dengan retribusi daerahnya. Besarnya jumlah pajak daerah pada tahun 2021 adalah Rp 11.718.378.320.505 lebih tinggi dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar Rp 11.139.173.309.780. Sedangkan retribusi daerah pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 91.634.269.205 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 93.279.121.699.

Hal ini merupakan keberhasilan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mulai bangkit dari adanya dampak virus covid-19 dan jika dikembangkan lagi dengan maksimal sumber-sumber potensi pendapatan asli daerahnya mungkin akan menyumbang lebih besar daripada sebelumnya. Sehingga pendapatan utama yang didapatkan dari daerah ini berasal dari potensi daerah tersebut dan bukan dari transfer pemerintah pusat. Meskipun demikian, Provinsi Jawa Tengah ini mengalami pertumbuhan pendapatan daerah yang positif setelah adanya bencana covid-19.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Likuiditas terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2021”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diuji adalah sebagai berikut ini.

1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2021?
2. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2021?
3. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2021?
4. Bagaimana tingkat rasio kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2021?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut ini.

1. Untuk menguji apakah pajak daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2021.
2. Untuk menguji apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2021.
3. Untuk menguji apakah likuiditas berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2021.
4. Untuk menganalisis bagaimana tingkat rasio kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2021.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut ini.

1. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintah dalam menggali potensi suatu daerah dan meningkatkan kemampuan kemandirian keuangan bagi setiap daerah.

2. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat betapa pentingnya pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan likuiditas terhadap kemandirian keuangan daerah.

3. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadi bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya terutama penelitian yang berkaitan dengan pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan likuiditas terhadap kemandirian keuangan daerah.

4. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi akademisi untuk memahami pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan likuiditas terhadap kemandirian keuangan daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan mengenai pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan likuiditas terhadap kemandirian keuangan daerah, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut ini.

1. Pajak daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan komponen penyumbang terbesar bagi pendapatan asli daerah, sehingga jika setiap orang pribadi atau badan patuh dalam membayar pajak daerahnya, maka penerimaan pajak daerah itu akan tinggi, dan ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat akan rendah karena pemerintah daerah tersebut mampu mengelola sumber pendapatan pajak daerah tersebut, sehingga akan meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya.
2. Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2021. Hasil penelitian ini dikarenakan retribusi daerah merupakan komponen penyumbang bagi pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah diduga belum mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada dan belum memaksimalkan

sumber penerimaan seperti retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan terutama dalam retribusi pemberian izin tertentu.

3. Likuiditas berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat likuiditas pemerintah daerah maka kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kewajiban (utang) jangka pendeknya semakin tinggi pula, sehingga utang yang dimiliki pemerintah daerah itu akan rendah, dan membuat tingkat kemandirian keuangan daerah itu semakin tinggi karena pemerintah daerah itu bisa membayar kewajibannya (utang) dengan menggunakan total aset lancar tanpa menggunakan persediaan.
4. Analisis rasio kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2021 paling tinggi dimiliki oleh Kota Magelang. Sebaliknya rasio terendah dimiliki oleh Kabupaten Wonogiri. Namun, rata-rata kabupaten/kota di Jawa Tengah berada pada pola hubungan konsultatif atau rendah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan penulis sebagai berikut ini.

1. Bagi pemerintah daerah, diharapkan dapat memperhatikan faktor pajak daerah dan likuiditas dalam meningkatkan sumber penerimaan daerah, dimana faktor tersebut telah terbukti mampu mempengaruhi kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2021.

2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat membayar pajak daerahnya dengan taat, dikarenakan hal tersebut mampu mempengaruhi penerimaan daerah, serta masyarakat dapat merasakan keuntungannya di masa mendatang seperti fasilitas-fasilitas umum, pembangunan jalan, jembatan dll.
3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian kembali dengan menambah variabel lain yang lebih bervariasi dan dianggap dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah serta memperluas populasi atau sampel penelitian dan menambah periode penelitian.
4. Bagi akademisi, diharapkan dapat menjadi pembelajaran untuk memahami pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan likuiditas terhadap kemandirian keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Balqis, M., Murdiati, S., & Amirah, M. (2018). Pengaruh Penerapan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Eks Karesidenan Pekalongan pada Tahun 2013-2017. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, 9 (2): 34-49.
- Datanesia. Beban Berat Anggaran Daerah. <https://datanesia.id/>. Diakses tanggal 10 Maret 2023.
- Direktorat Jenderal Perimbangan keuangan. Data Keuangan Daerah Mulai 2006. <https://djpk.kemenkeu.go.id/>. Diakses 8 Maret 2023.
- Febriayanti, F. & Faris, M. (2019). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 5 (2): 162-175.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hadi, W. (2010). Pengaruh Likuiditas dan Leverage terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2007 di Wilayah Provinsi Aceh). *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 3 (1): 29-51.
- Haerunnisa. (2018). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Makassar. *Economics Bosowa*, 4 (2): 44-55.
- Halim, A. (2001). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, A. & Kusufi, M. S. (2013). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Daerah)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Portal Berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dongkrak Ekonomi, Peran Keris Jateng Dioptimalkan. <https://jatengprov.go.id/>. Diakses tanggal 13 April 2023
- Karouw, T. L., Engka, D. S. M. & Tolosang, K. D. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Penerimaan Retribusi Daerah, dan Penerimaan Pajak Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah efisiensi*, 22 (4): 77-88.

- KBBI, 2023. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI). (Online, diakses tanggal 8 mei 2023)
- Lukitawati, L. J. & Pringgabayu, D. (2020). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Journal of Accounting Taxing and Auditing (JATA)*, 1 (2): 1-11.
- Mahardika, I. G. N. S., Suryaadi, G. N. & Artini, L. G. S. (2012). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah di Era Otonomi pada pemerintah Kabupaten Tabanan. *Denpasar. Universitas Udayana: 733-750.*
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. ANDI. Yogyakarta.
- Nggilu, F., Harijanto, S., & Tirayoh, V. (2016). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16 (4): 623-635.
- Purwanti, E., & Noviyanti, E. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Salatiga tahun 2014-2018. *Jurnal Among Makarti*, 14 (2): 1-12.
- Rahmayani, M. W. & Kurnadi, E. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2021. *Jurnal Akuntansi Kompetitif*, 5 (2): 224-234.
- Rinaldi, U. (2012). Kemandirian Keuangan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Eksos*, 2 (8): 105-113.
- Saraswati, N. P. & Nurharjanti, N. N. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Prosiding BIEMA (Business Management, Economic, and Accounting National Seminar)* (2): 51-64.
- Sugiyono. 2019. *Statistika untuk Penelitian*. Alfabeta. Bandung.
- Sunarto. & Sunyoto, Y. (2016). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Daerah yang berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah). *Dharma Ekonomi*, 23 (43): 13-22.
- Sutrisno, M. T. & Santoso, A. (2021). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan Belanja Modal Sebagai Variabel. *Majalah Inspiratif*, 7 (13): 79-99.

Tempo. 10 Provinsi Kaya di Indonesia, DKI Jakarta Pertama.
<https://bisnis.tempo.co/>. Diakses tanggal 20 Desember 2022.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah